****

Tahun

**2023**

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKJIP

http://disbimacipta.pinrangkab.go.id

# **KATA PENGANTAR**

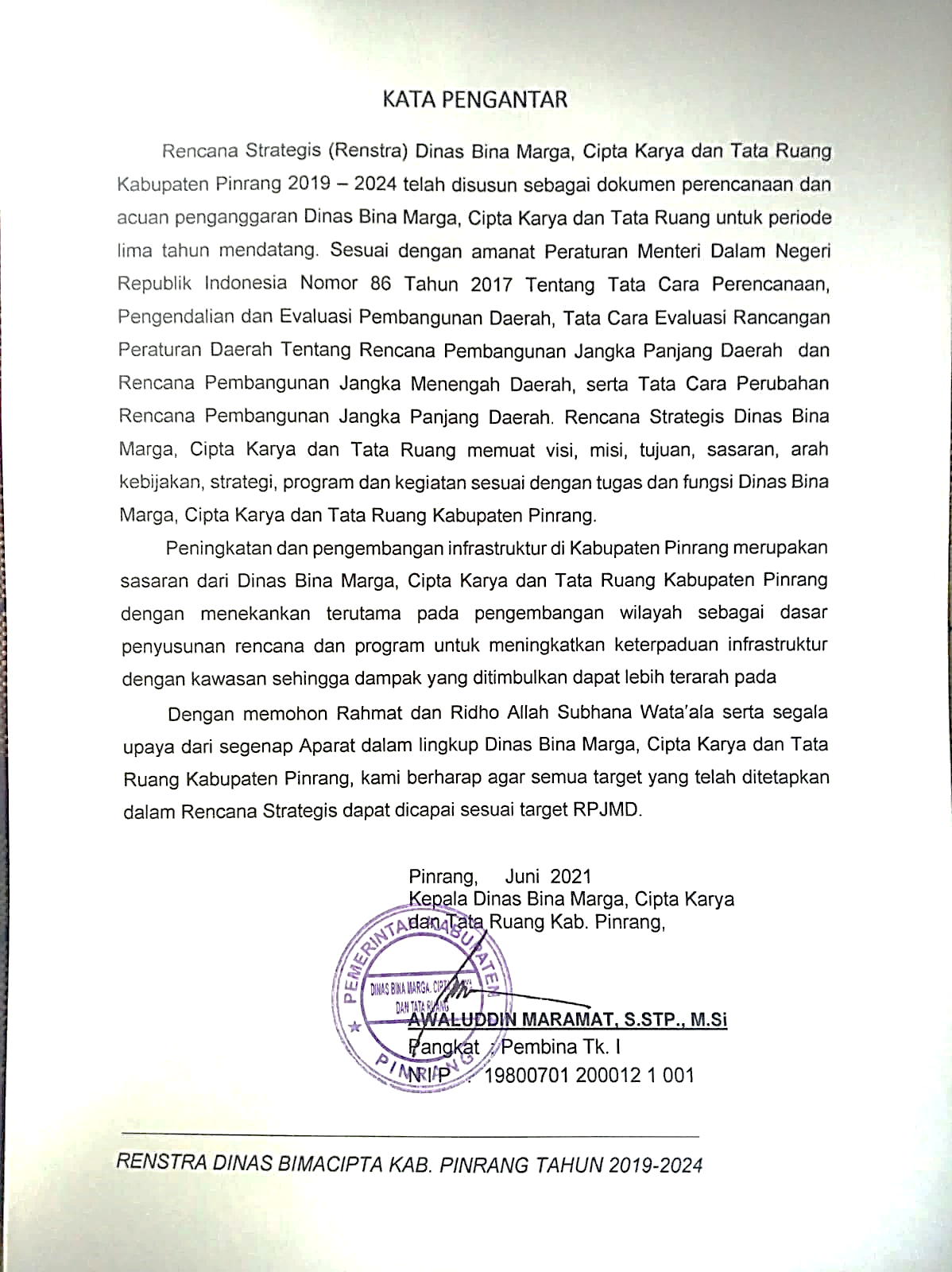
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Penyusunan laporan LKjIP Tahun 2023 ini sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Didalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), tercantum program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen perjanjian kinerja Kepala Dinas dengan Bupati Pinrang dan selanjutnya pertanggungjawabannya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Semoga dengan tersusunnya dokumen ini, dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja di tahun selanjutnya, dan menjadi acuan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada pemerintahan yang baik.

Pinrang, 2024

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang

**AWALUDDIN MARAMAT, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19800701 200012 1 001

# **DAFTAR ISI**

|  |  |
| --- | --- |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 6 |
| * 1. Umum | 6 |
| * 1. Organisasi | 9 |
| * 1. Aspek Strategi Organisasi |  |
| * 1. Perjanjian Kinerja |  |
| * 1. Standar Penilaian Kinerja |  |
|  |  |
| **BAB II PERENCANAAN KINERJA** | 45 |
| a. Tujuan dan Sasaran  b. Strategi dan Arah Kebijakan  c. Indikator Kinerja Utama | 46  48  55 |
| d. Perjanjian Kinerja  e. Standar Penilaian Kinerja |  |
|  |  |
| **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** |  |
| 1. Capaian Kinerja Organisasi | 60 |
| b. Upaya Perbaikan pada Perencanaan Berikutnya  c. Realisasi Anggaran | 63  74    75 |
| **BAB IV PENUTUP** | 76 |

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan ……. 33

Tabel 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang …..…… 34

Tabel 2.3 Asset Tanah Disbimacipta Kab. Pinrang ...…………. 35

Tabel 2.4 Asset Alat alat Angkutan ……………………………... 35

Tabel 2.5 Asset Alat alat Berat …..………………………..…….. 37

Tabel 2.6 Asset Alat alat Laboratorium ……..………………….. 38

Tabel 2.7 Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan …….. 42

Tabel 2.8 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja …….. 48

Tabel 3.1 Kategori Nilai Capaian untuk persentase

pencapaian sasaran ……………………………...…… 59

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama …………………...………….. 61

Tabel 3.3 Capaian Kinerja sampai dengan akhir

periode Renstra ………….……………………………. 62

Tabel 3.4 Sasaran strategis Kesatu …………………………….. 63

Tabel 3.5 Sasaran Strategis Kedua ……………………..……… 66

Tabel 3.6 Sasaran Strategis Ketiga ...………………..…………. 67

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Sasaran ………………………… 68

Tabel 3.8 Alokasi Per Sasaran pembangunan…………………. 69

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran ... 71

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DISBIMACIPTA

Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah

Gambar 1.3 Struktur Organisasi UPT Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan

Gambar 1.4 Struktur Organisasi UPT Prasarana dan Sarana Infrastruktur

Gambar 1.5 Struktur Organisasi UPT Pengujian Bahan dan Pengelolaan Alat Berat

## BAB I

## PENDAHULUAN

**A. UMUM**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada setiap instansi pemerintah atas dasar penggunaan barang dan jasa dengan anggaran. Oleh karena itu dalam laporan LKjIP diuraikan mengenai kinerja instansi selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas inerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat Daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan perangkat Daerah dimasa datang. Identifikasi permasalahan dilakukan berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah pelayanan perangkat Daerah yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Masalah pokok dijabarkan dalam tugas dan fungsi pelayanan DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang. Masalah merupakan penjabaran dari masalah pokok yang terjadi pada perangkat Daerah. Akar masalah merupakan penjabaran lebih dalam untuk mengetahui permasalahan pelayanan perangkat Daerah.. Gambaran pelayanan perangkat daerah terbagi atas 2 (dua) yaitu gambaran kinerja pelayanan perangkat daerah dan gambaran kinerja keuangan perangkat daerah.

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja yang selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja SKPD. Entitas akuntabilitas kinerja SKPD adalah unit instansi pemerintah daerak selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pngukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Setiap entitas akuntabilitas kinerja SKPD melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara: (1) membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan, dan (2) membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra SKPD.

Selain pengukuran kinerja, setiap entitas akuntabilitas kinerja SKPD juga melakukan pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah. Pengelolaan data kinerja mencakup : (1) penetapan data dasar (baseline data), (2) penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi, (3) penatausahaan dan penyimpanan data, dan (4) pengkompilasian dan perangkuman.

Entitas akuntabilitas kinerja SKPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja terdiri dari laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja interim adalah laporan kinerja triwulan yang disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulan. Laporan kinerja tahunan SKPD disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan laporan kinerja tahunan SKPD, Bupati menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PANRB, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan kinerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Kepala Daerah. Hasil reviu dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh APIP.

**A.1 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2023 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang selama Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang pada Tahun 2023;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).
5. **ORGANISASI**

Pemetaan kelembagaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Numenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan sebagai berikut : (1) air minum, (2) air limbah, (3) drainase, (4) permukiman, (5) bangunan gedung, (6) penataan bangunan dan lingkungan, (7) jalan, dan (8) penataan ruang.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pinrang membentuk DISBIMACIPTA untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang serta pembentukan 3 UPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bangunan, Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Peraturan Bupati Pinrang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Pengujian Bahan dan Pengelolaan Alat Berat pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.

1. **Uraian Tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

Uraian tugas dan fungsi DISBIMACIPTA sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Tugas :

Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati kepadanya.

1. Fungsi :
2. Perumuasan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Rincian Tugas :
8. Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
9. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
10. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
11. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
12. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
13. Menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
14. Merumuskan kebijakan teknis di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
15. Mengoordinir penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat dalam lingkup Dinas;
16. Melakukan pembinaan terhadap penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
17. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, pemerintah provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran tugas;
18. Menetapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Dinas;
19. Membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkup Dinas;
20. Mengoordinir penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinas;
21. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta mencari solusi pemecahan masalah dalam lingkup Dinas;
22. Menyelenggarakan pembinaan terhadap penyusunan Standar Operasional Prosedur dalam lingkup Dinas;
23. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Bina Marga, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bidang Penataan Bangunan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Tata Ruang;
24. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
25. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Perundang-undangan;
26. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
27. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
28. Sekretaris
29. Tugas :

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkup Dinas.

1. Fungsi :
2. Pengoordinasian penyelenggaraan fungsi dalam lingkup dinas;
3. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup dinas;
4. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian , dan hukum dalam lingkup dinas;
5. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkup dinas; dan
6. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Rincian Tugas:
8. Menyusun rencana kegiatan dinas sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas;
9. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
10. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
11. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
12. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
13. Membantu Kepala Dinas menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran dinas;
14. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dalam lingkup Dinas;
15. Menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
16. Mengoordinir penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal lingkup Dinas;
17. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Dinas sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan kegiatan;
18. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan, program, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja Dinas;
19. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas;
20. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
21. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
22. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan dalam lingkup Dinas;
23. Mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam lingkup Dinas;
24. Melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi dalam lingkup Dinas;
25. Memfasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkup Dinas;
26. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Bina Marga, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bidang Penataan Bangunan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Tata Ruang;
27. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
28. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Perundang-undangan;
29. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
30. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
31. Kepala Bidang Bina Marga
32. Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengadaan pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan.

1. Fungsi :
   1. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Bidang Bina Marga;
   2. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Bina Marga;
   3. Penyelengaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan kegiatan Bidang Bina Marga; dan
   4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Rincian Tugas :
   1. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran Bidang Bina Marga;
   2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
   3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
   4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
   5. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
   6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Bina Marga;
   7. Memeriksa dan meneliti data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan jalan;
   8. Memeriksa dan meneliti data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan jembatan;
   9. Memeriksa dan meneliti data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis preservasi jalan dan jembatan;
   10. Mengkoordinasikan pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
   11. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan teknik jalan;
   12. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan teknik jembatan;
   13. Mengkoordinasikan pelaksanaan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan;
   14. Mengkoordinasikan pelaksanaan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jembatan;
   15. Mengkoordinasikan pelaksanaan preservasi jalan;
   16. Mengkoordinasikan pelaksanaan preservasi jembatan;
   17. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
   18. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan;
   19. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang bina marga;
   20. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
   21. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Perundang-undangan;
   22. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
   23. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
4. Tugas :

membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.

1. Fungsi :
2. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggarakan tugas program dan kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
3. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
4. Penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Rincian tugas :
7. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
8. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
9. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
10. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
11. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
12. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
13. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang penyediaan air minum;
14. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
15. Mengkoordinasikan penyusunan sistem pengelolaan dan penanganan sampah regional;
16. Mengkoordinasikan penyusunan sistem pengelolaan dan penanganan air limbah domestik regional;
17. Mengkoordinasikan penyusunan sistem pengelolaan dan penanganan sistem drainase yang terhubung dengan sungai;
18. Memeriksa dan meneliti data dasar terhadap akses pelayanan air minum;
19. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan air minum meliputi pembangunan, peningkatan, rehabillitasi, dan pemeliharaan prasarana penyediaan air minum termasuk pemberdayaan kelembagaan sistem penyediaan air minum;
20. Memeriksa dan meneliti data dasar terhadap akses pelayanan prasarana pengelolaan air limbah domestik, drainase, dan persampahan;
21. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan permukiman meliputi pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pengelolaan air limbah domestik, drainase, dan persampahan serta pemberdayaan kelembagaan sistem pengelolaan air limbah;
22. Mengkordinasikan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fasilitasi pengurangan sampah regional serta pemberdayaan kelembagaan sistem penanganan sampah;
23. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman;
24. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
25. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
26. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Perundang-undangan;
27. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
28. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
29. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
30. Tugas :

membantu kepala dinas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

1. Fungsi :
2. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
3. Pembinaan,pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan kegiatan bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Rincian tugas :
7. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
8. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
9. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
10. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
11. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
12. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
13. Menyusun standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
14. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman meliputi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
15. Menyusun program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
16. Melakukan sinkronisasi program-program Keciptakaryaan;
17. Melakukan fasilitasi dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
18. Pelaksanaan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya;
19. Memeriksa dan meneliti penyusunan strategi dan kebijakan teknis penataan bangunan dan lingkungan;
20. Mengkoordinasikan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan berbasis kawasan meliputi tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hijau, dan pelestarian bangunan dan lingkungan;
21. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan bangunan gedung;
22. Memeriksa dan meneliti penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
23. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemugaran bangunan;
24. Memverifikasi dan menyetujui rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB);
25. Menyetujui penempatan tim teknis pada unit pelayanan terpadu satu pintu;
26. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan rekomendasi pembongkaran bangunan gedung;
27. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
28. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyediaan database permukiman;
29. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyediaan database bangunan gedung dan bangunan negara;
30. Menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
31. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang Penataan Bangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
32. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Penataan Bangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
33. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
34. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Perundang-undangan;
35. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
36. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
37. Kepala Bidang Tata Ruang
38. Tugas :

membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tata ruang.

1. Fungsi :
2. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan bidang tata ruang;
3. Pembinaan,pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang tata ruang;
4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan kegiatan bidang tata ruang; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Rincian tugas :
7. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran Bidang Tata Ruang;
8. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
9. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
10. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
11. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
12. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Tata Ruang;
13. Memeriksa dan meneliti konsep penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penataan ruang Daerah;
14. Mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang Daerah;
15. Meneliti, memeriksa, dan menetapkan sistem informasi penataan ruang Daerah meliputi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya;
16. Mengkoordinasikan penyediaan data informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Daerah beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital;
17. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar Daerah serta Daerah Provinsi dan pemerintah;
18. Memeriksa, meneliti, dan menetapkan konsep penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Daerah;
19. Memeriksa, meneliti, dan menetapkan konsep penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis Daerah;
20. Memeriksa, meneliti, dan menetapkan konsep perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah Daerah meliputi rencana detail;
21. Memeriksa, meneliti, dan menetapkan konsep perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang kawasan strategis;
22. Memeriksa, meneliti, dan menetapkan konsep penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program, dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah;
23. Mengkoordinasilan pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang;
24. Memeriksa dan meneliti konsep pelaksanaan standar pelayanan minimun bidang penataan ruang di Daerah;
25. Memeriksa, meneliti, dan menetapkan konsep penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan ketentuan arahan peraturan zonasi dan pemberian insentif dan disinsentif;
26. Memverifikasi dan menyetujui permohonan izin pemanfaatan ruang dalam menerbitkan rekomendasi sesuai dengan peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya;
27. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang;
28. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan untuk memastikan tersedianya luasan ruang terbuka hijau (RTH) publik sebesar 20 % dari luas wilayah kawasan perkotaan;
29. Memverifikasi dan menyetujui pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang Daerah;
30. Melaksanaann koordinasi dan pembinaan serta operasionalisasi PPNS penataan ruang Daerah;
31. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang;
32. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Tata ruang;
33. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang;
34. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Perundang-undangan;
35. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
36. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
37. Kepala UPT Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pekerjaan Umum
38. Tugas :

Mengoordinir serta mengevaluasi kegiatan pelaksanaan perintisan dan pemeliharaan infrastruktur, agar sasaran dan tujuan dapat dicapai berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Dinas dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

1. Fungsi :
2. Penyusunan bahan kebijakan operasional UPT;
3. Penyusunan rencana strategi operasional UPT;
4. Pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT;
5. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya;
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
8. Rincian tugas:
9. Menyusun rencana kerja dan anggaran di bidang infrastruktur;
10. Melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional pembangunan infastruktur yang menjadi tanggungjawabnya;
11. Melaksanakan perintisan dan pemeliharaan infrastruktur;
12. Melaksanakan pelaporan kegiatan;
13. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugasnya.
15. Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah
16. Tugas :

Mengoordinir serta mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan air limbah, agar sasaran dan tujuan dapat dicapai berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Dinas dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

1. Fungsi :
2. Penyusunan bahan kebijakan operasional UPT;
3. Penyusunan rencana strategis operasional UPT;
4. Pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya;
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8. Rincian Tugas:
9. Menyusun rencana kerja dan anggaran di bidang pengelolaan air limbah;
10. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan air limbah;
11. Melaksanakan penyedotan dan pengangkutan air limbah;
12. Melaksanakan operasionalisasi pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah;
13. Melaksanakan pengendalian kegiatan pengelolaan air limbah yang dikelola oleh masyarakat;
14. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, pengembangan kerjasama antar daerah, kemitraan dalam pengelolaan air limbah;
15. Menyusun standar operasional prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi standar operasional prosedur; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
17. Kepala UPT Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan
18. Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional pengelolaan penerangan jalan umum dan pertamanan serta merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengelolaan penerangan jalan umum, taman dan makam.

1. Fungsi:
2. Penyusunan bahan kebijakan operasional UPT;
3. Penyusunan rencana strategis operasional UPT;
4. Pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya;
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8. Rincian Tugas:
9. Merencanakan kegiatan dan program kerja UPT berdasarkan analisis masalah dan kebutuhan dengan mengacu pada rencana strategis Dinas agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan baik;
10. Melaksanakan pemasangan baru penerangan jalan umum;
11. Melaksanakan pemeliharaan penerangan jalan umum;
12. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap berfungsinya penerangan jalan umum dan pertamanan yang berada dalam pengelolaa UPT;
13. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap terawatnya keasrian, keindahan, kebersihan, dan kerapihan taman dan makam yang berada dalam tanggungjawab UPT;
14. Melaksanakan pengelolaan pengurusan pemakaman pada areal tempat pemakaman umum yang berada dalam pengelolaan UPT;
15. Melaksanakan pengaturan dalam pengadaan/ penyediaan, penyimpanan dan distribusi barang dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan penerangan jalan umum dan pertamanan;
16. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan/pemakaian sarana dan prasarana yang berada dalam penguasaan UPT;
17. Mempelajari, mengkaji, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya dan menetapkan standar operasional prosedur agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
18. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
19. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
20. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
21. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
22. Memberikan masukan dan saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas; dan
23. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
24. Kepala UPT Pengujian Bahan dan Pengelolaan Alat Berat
25. Tugas:

Melaksanakan kegiatan teknis operasional pengujian bahan dan pengelolaan alat berat di lingkungan pengujian bahan dan pengelolaan alat berat.

1. Fungsi:
2. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja Pengujian Bahan dan Pengelolaan Alat Berat;
3. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan misi Pengujian Bahan dan Pengelolaan Alat Berat;
4. menyusun standar operasional prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi standar operasional prosedur setiap tahnnya;
5. pengujian kelayakan bahan dan mutu konstruksi;
6. melaksanakan pengumpulan, pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi pembangunan/perbaikan konstruksi;
7. melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian;
8. melaksanakan pelayanan masyarakat berupa sewa ataupun peminjaman peralatan dan jasa perbengkelan;
9. melaksanakan kerja sama peralatan maupun perbengkelan dalam optimalisasi pelayanan masyarakat;
10. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Laboratorium Pengujian bahan konstruksi dan alat berat;
11. melaksanakan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan laboratorium konstruksi dan alat berat;
12. menyiapkan bahan dan membuat laporan penerimaan dan retribusi pemakaian peralatan dan laboratorium pengujian material konstruksi;
13. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
14. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi;
15. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;dan
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. **Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

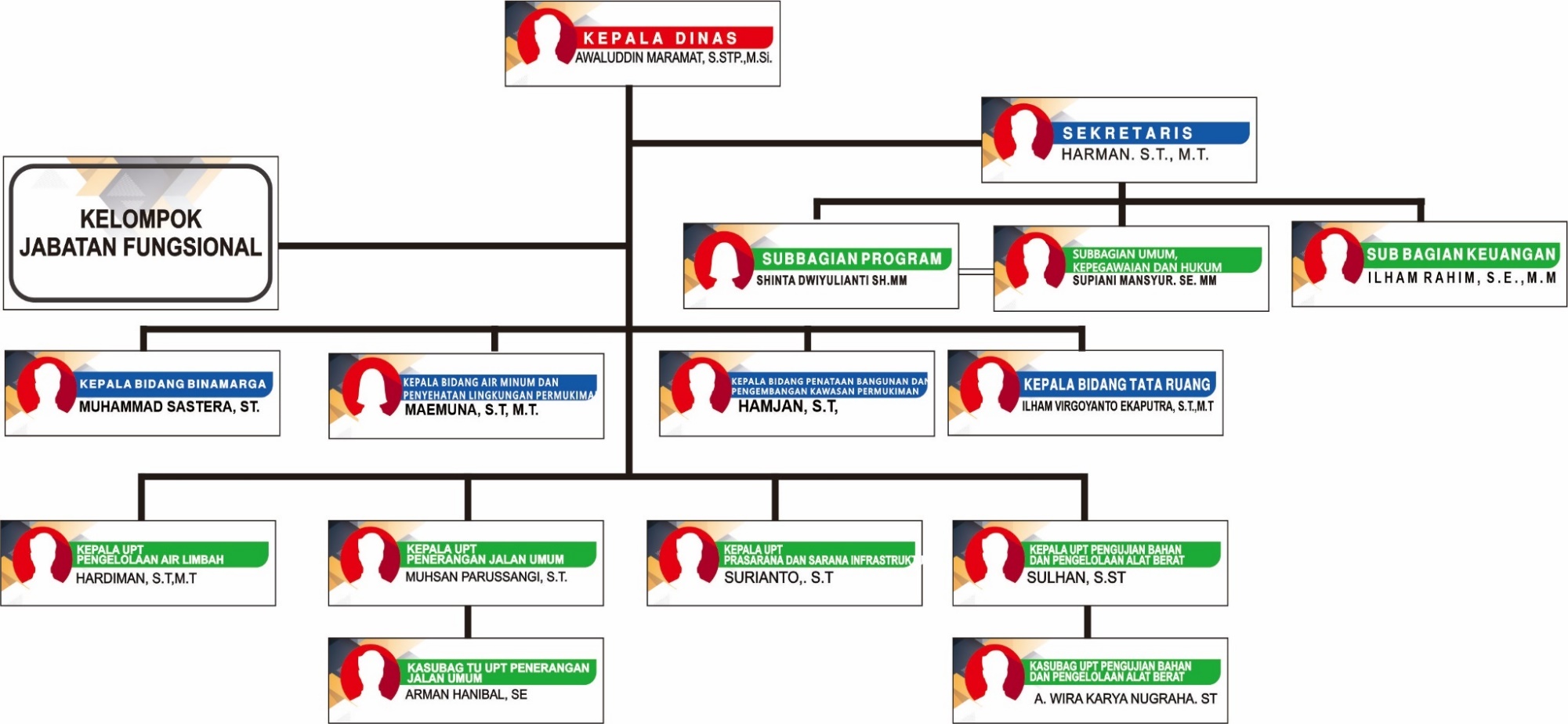
Struktur organisasi DISBIMACIPTA terdiri atas :

1. Kepala Dinas (Eselon II.b);
2. Sekretaris (Eselon III.a), yang membawahi :
3. Sub Bagian Program (Eselon IV.a);
4. Sub Bagian Keuangan (Eselon IV.a); dan
5. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum (Eselon IV.a).
6. Kepala Bidang Bina Marga (Eselon III.b),
7. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Eselon III.b),
8. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (Eselon III.b), Kepala Bidang Tata Ruang (Eselon III.b),
9. Kepala UPT Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pekerjaan Umum (Eselon IV.a);
10. Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah (Eselon IV.a);
11. Kepala UPT Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan (Eselon IV.a), yang membawahi:
12. Sub Bagian Tata Usaha (Eselon IV.b).
13. Kepala UPT Pengujian Bahan dan Pengelolaan Alat Berat (Eselon IV.a), yang membawahi :
14. Sub Bagian Tata Usaha (Eselon IV.b).

Struktur organisasi DISBIMACIPTA dapat dilihat pada Gambar 1.1, UPT Pengelolaan Air Limbah pada Gambar 1.2, UPT Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan pada Gambar 1.3, dan UPT Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Gambar 1.4. UPT Pengujian Bahan dan Pengelolaan Alat Berat pada Gambar 1.5 dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG KABUPATEN PINRANG



**Gambar 1.1**

**Struktur Organisasi DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang**

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG KABUPATEN PINRANG

(Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 54 Tahun 2017)



**Gambar 1.2**

**Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah**

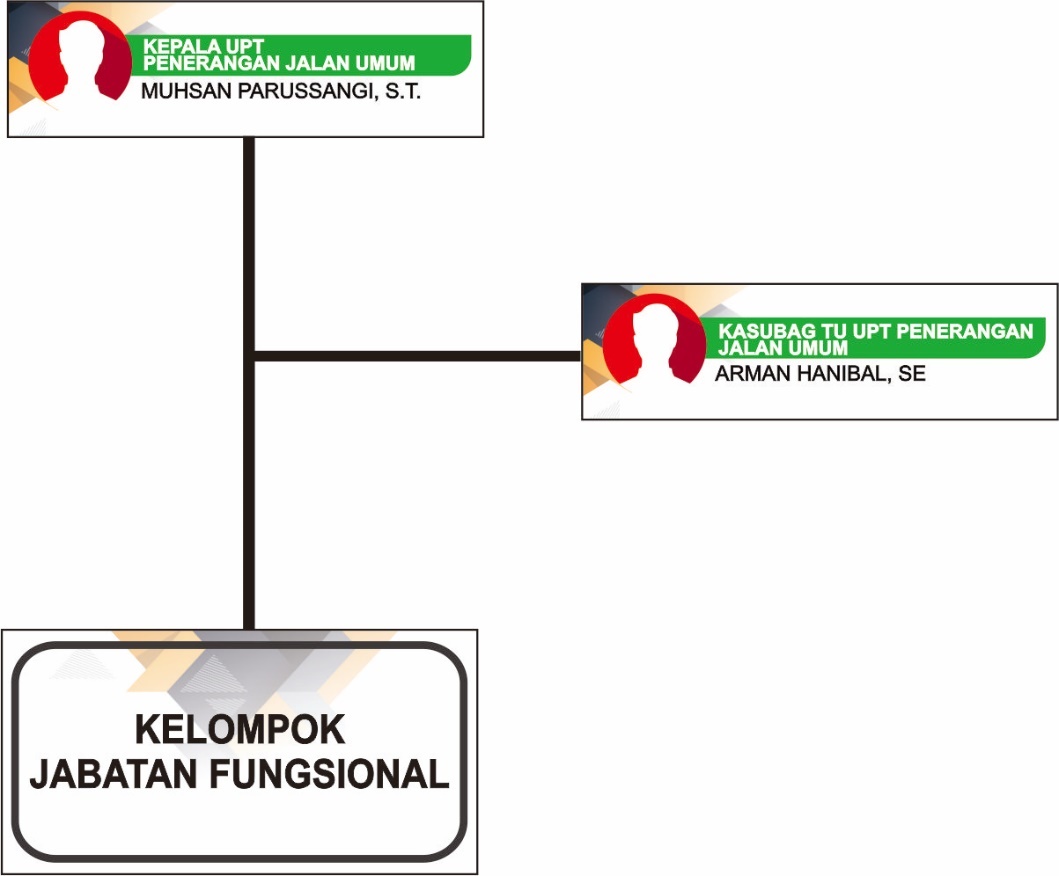
STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

PENERANGAN JALAN UMUM DAN PERTAMANAN

PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG KABUPATEN PINRANG

(Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 61 Tahun 2017)



**Gambar 1.3**

**Struktur Organisasi UPT Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan**

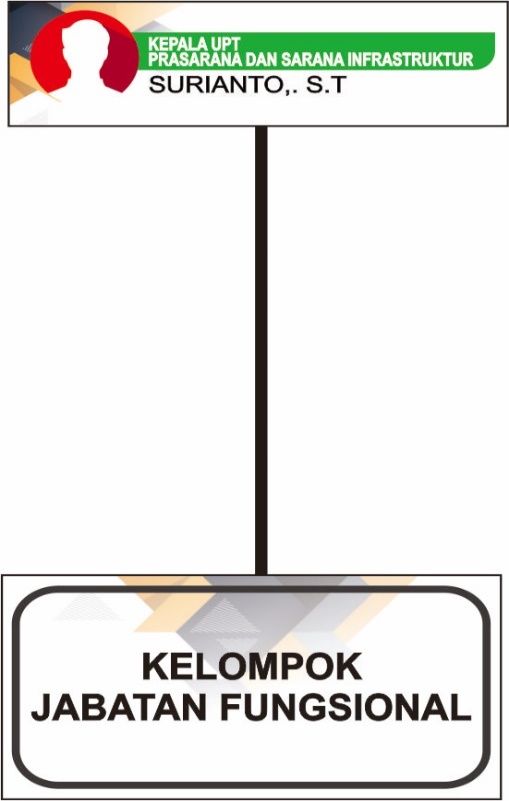
STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

PRASARANA DAN SARANA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG KABUPATEN PINRANG

(Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2017)



**Gambar 1.4**

**Struktur Organisasi UPT Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pekerjaan Umum**

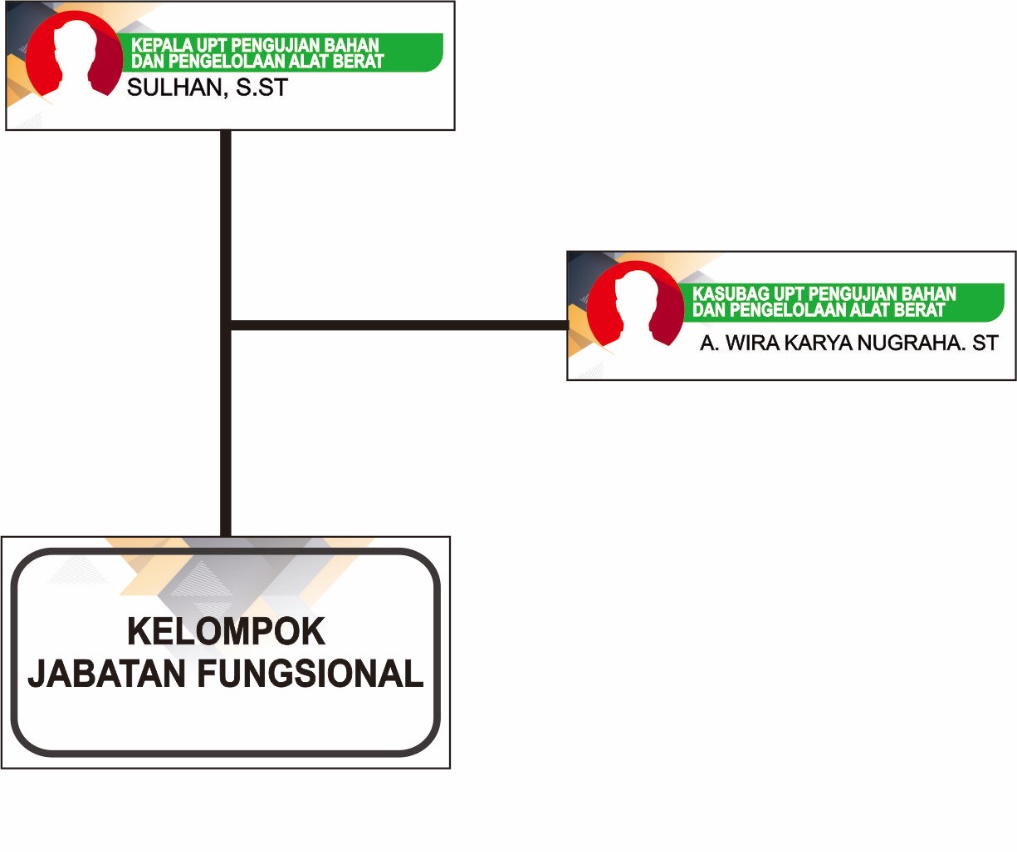
STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

PENGUJIAN BAHAN DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT

PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG KABUPATEN PINRANG

(Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 10 Tahun 2023



**Gambar 1.5**

**Struktur Organisasi UPT PENGUJIAN BAHAN DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT**

1. **Sumber Daya Perangkat Daerah**
   * + 1. **Sumber Daya Manusia Aparatur**

Sumber daya manusia aparatur atau pegawai negeri sipil pada DISBIMACIPTA per 30 Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel.2.1 dan Tabel.2.2

**Tabel 2.1**

**Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pendidikan | Laki-Laki (Orang) | Perempuan (Orang) | Jumlah (Orang) |
| 1 | S3 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | S2 | 7 | 8 | 15 |
| 3 | S1 | 21 | 13 | 34 |
| 4 | Diploma III | 0 | 1 | 1 |
| 5 | SLTA/SLTP/SD | 10 | 8 | 18 |
| Jumlah | | 39 | 31 | 70 |

Sumber: *www.sikda.pinrangkab.go.id*

Berdasarkan Tabel.2.1 diatas menunjukkan bahwa PNS dengan jenjang pendidikan Doktor (S3) sebanyak 2 orang atau 2,87 %, PNS dengan jenjang pendidikan Magister (S2) sebanyak 15 orang atau 21,42 %, PNS dengan jenjang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 34 orang atau 48,57 %, PNS dengan jenjang pendidikan Diploma III masing-masing sebanyak 1 orang atau 1,42 %, dan PNS dengan jenjang pendidikan SLTA/SLTP/SD sebanyak 18 orang atau 25,71 %.

Dari data pada Tabel 2.1 menunjukkan bahwa kompetensi SDM pada DISBIMACIPTA sangat memadai atau sebanyak 52 orang telah menempuh pendidikan pada perguruan tinggi. Jumlah PNS berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel.2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2**

**Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Golongan Ruang | Laki-Laki (Orang) | Perempuan (Orang) | Jumlah (Orang) |
| 1 | I/d | 1 | 0 | 1 |
| 2 | II/b | 0 | 0 | 0 |
| 3 | II/c | 4 | 1 | 5 |
| 4 | II/d | 1 | 2 | 3 |
| 5 | III/a | 7 | 6 | 13 |
| 6 | III/b | 3 | 3 | 6 |
| 7 | III/c | 7 | 5 | 12 |
| 8 | III/d | 9 | 7 | 12 |
| 9 | IV/a | 5 | 6 | 11 |
| 10 | IV/b | 2 | 1 | 3 |
| Jumlah | | 39 | 31 | 70 |

Sumber: *www.sikda.pinrangkab.go.id*

Berdasarkan Tabel.2.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah PNS dengan Golongan Ruang terbesar yaitu golongan IV sebanyak 14 orang atau 20% , golongan III sebanyak 43 orang atau 84,05 %, golongan II sebanyak 8 orang atau 11,42 %, dan golongan I sebanyak 1 orang atau 1,42 %.

1. **Asset Yang Dikelola**

Asset/modal yang dikelola DISBIMACIPTA berdasarkan Buku Inventaris Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 meliputi (1) tanah, (2) peralatan dan mesin, dan (3) jalan, iringan dan jaringan. Asset tanah yang dimiliki DISBIMACIPTA meliputi tanah kantor (ex. RSUL). Kantor DISBIMACIPTA sebelumnya merupakan Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang dan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang. Kantor lama DISBIMACIPTA terletak di Jl. Ir Juanda yang saat ini ditempati oleh SMA Negeri 11 Pinrang (SMA Unggulan) sejak tahun 2010. Asset tanah DISBIMACIPTA dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Berdasarkan Tabel 2.3 menunjukkan bahwa asset tanah terdiri atas 1 lokasi yaitu tanah untuk penggunaan kantor. Asset/modal selanjutnya adalah peralatan dan mesin meliputi alat-alat angkutan, alat-alat berat, dan alat-alat laboratorium.

**Tabel 2.3**

**Asset Tanah DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Barang / Nama barang** | **Luas (M2)** | **Tahun Pengadaan** | **Letak / Alamat** | **Penggunaan** | **Usul Asal** | **Ket** |
|
|
| 1 | Tanah (Ex.Rumah Sakit Lama) ke Dinas PUPR | 7.097 | 2008 | Jl. Lasinrang Kec. Paleteang | Tanah Kantor | APBD | Mutasi Asset Setda |

*Sumber : DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang, 2023*

Alat-alat angkutan terdiri atas kendaraan operasional UPT, kendaraan Roda 2, kendaraan Roda 3, dan kendaraan Roda 4. Asset alat-alat angkutan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4**

**Asset Alat-Alat Angkutan**

**DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama barang/ Jenis barang** | **Merk/ Type** | **Kapasitas Mesin (cc)** | **Tahun Pembelian** | **Nomor Kendaraan** | **Sumber** | **Keterangan** |
|
|
| 1 | Mobil Tinja | Toyota dyna rino | 3660 | 1998 | DP 8045 D | APBD | Operasional UPT |
| 2 | Dump Truk | MITSUBISHI / FE 349 LIGHT TRUCK BAK | 3907 | 1999 | DP 9015 N | APBD | Operasional UPT |
| 3 | Dump Truk | MITSUBISHI / FE 349 LIGHT TRUCK BAK | 3907 | 1999 | DP 8081 D | APBD | Operasional UPT |
| 4 | Sepeda Motor | Suzuki/FK110 SCD K6 | 110 | 2009 | DP 6976 R | APBD | Roda 2 |
| 5 | Sepeda Motor | Suzuki/FK110 SCD K6 | 110 | 2009 | DP 6975 R | APBD | Roda 2 |
| 6 | Mobil Pick Up | Toyota Hilux SC.4X2 | 1000 | 2010 | DP 8035 D | APBD | Operasional UPT |
| 7 | Motor Trial Dinas | Kawasaki | 250 | 2011 | DP 6960 NE | APBD | Roda 2 |
| 8 | Motor Trial Dinas | Kawasaki | 250 | 2011 | DP 6957 RB | APBD | Roda 2 |
| 9 | Motor Trial Dinas | Kawasaki | 250 | 2011 | DP 6860 RC | APBD | Roda 2 |
| 10 | Motor Trial Dinas | Kawasaki KLX | 150 | 2012 | DP 6852 D | APBD | Roda 2 |
| 11 | Motor Trial Dinas | Kawasaki KLX | 150 | 2012 | DP 6853 D | APBD | Roda 2 |
| 12 | Sepeda Motor | Yamaha Soul | 115 | 2012 | DP 6846 D | APBD | Roda 2 |
| 13 | Sepeda Motor | Yamaha Soul | 115 | 2012 | DP 6847 D | APBD | Roda 2 |
| 14 | Sepeda Motor | Yamaha X-RIDE/2BU | 115 | 2014 | DP 6900 R | APBD | Roda 2 |
| 15 | Sepeda Motor | Yamaha X-RIDE/2BU | 115 | 2014 | DP 6901 R | APBD | Roda 2 |
| 16 | Sepeda Motor | Yamaha X-RIDE/2BU | 115 | 2014 | DP 6902 R | APBD | Roda 2 |
| 17 | Mini Bus | Toyota Avanza 1,5 Veloz M/T (Luxury New) | 1500 | 2014 | DP 10 D | APBD | Roda 4 |
| 18 | Motor Penyiram Tanaman | VIAR V 15 RL | 150 | 2014 | DP 6806 RA | APBD | Roda 3 |
| 19 | Sepeda Motor lapangan | Kawasaki / Trail LX 150 F | 150 | 2015 | DP 6946 RA | APBD | Roda 2 |
| 20 | Sepeda Motor lapangan | Kawasaki / Trail LX 150 F | 150 | 2015 | DP 6945 RA | APBD | Roda 2 |
| 21 | Sepeda Motor lapangan | Kawasaki / Trail LX 150 F | 150 | 2015 | DP 6947 RA | APBD | Roda 2 |
| 22 | Sepeda Motor lapangan | Kawasaki / Trail LX 150 F | 150 | 2015 | DP 6948 RA | APBD | Roda 2 |
| 23 | Mobil Double cabin | Toyota All New Hilux 2.5 4x4 g M/T D-CAB Diesel (VIN 2016) | 2494 | 2016 | DP 8066 D | APBD | Roda 4 |
| 24 | Sepeda Motor | Kawasaki / KLX 150 BF | 150 | 2016 | DP 6974 RB | APBD | Roda 2 |
| 25 | Skylift Crane / Mobil Unit Penerangan | Isuzu /NHR 55 CC E2-1 | 2771 | 2016 | DP 8068 D | APBD | Operasional UPT |
| 26 | Motor Matic | YAMAHA FREEGO S VIN 2019 | 125 CC | 2019 | DP 6983 RC | APBD | Operasional Tata Ruang |
| 27 | Truk Tinja | TOYOTA DYNA 130 HT | 4009cc | 2019 | DP 8083 D | APBD | Operasional UPT |
| 28 | Truk Tinja | TOYOTA DYNA 130 HT | 4009cc | 2019 | DP 8082 D | APBD | Operasional UPT |
| 29 | Motor lapangan | Motor Trail Kawasaki | 150 CC | 2021 | DP 6948 S | APBD | Operasional UPT |
| 30 | Motor Matic | YAMAHA FREEGO S VIN 2019 | 125 CC | 2021 | DP 6956 S | APBD | Operasional UPT |
| 31 | Motor Matic | YAMAHA FREEGO S VIN 2019 | 125 CC | 2021 | DP 6957 S | APBD | Operasional UPT |
| 32 | Motor Matic | Yamaha All New Aerox | 155 CC | 2023 |  | APBD | Operasional AMPLP |
| 33 | Motor Matic | Yamaha All New Aerox | 155 CC | 2023 |  | APBD | Operasional Sekretariat |
| 34 | Motor Matic | Yamaha All New Aerox | 155 CC | 2023 |  | APBD | Operasional Sekretariat |

*Sumber : DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang, 2023*

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas menunjukkan bahwa alat-alat angkutan atau kendaraan dinas/operasional DISBIMACIPTA terdiri atas 2 (dua) kendaraan dinas Roda 4, 20 (Dua Puluh) kendaraan dinas/operasional Roda 2 untuk operasional Dinas dan UPT-UPT, dan 5 (lima) kendaraan operasional UPT untuk operasional UPT-UPT dan Bidang Bina Marga. Peralatan dan mesin selanjutnya adalah alat-alat berat yang dapat dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini:

**Tabel 2.5**

**Asset Alat-Alat Berat**

**DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama barang / Jenis barang** | **Merk / Type** | **Bahan** | **Tahun Pembelian** | **Sumber** | **Keterangan** |
|
|
| 1 | Single Drum Vibratory Roller (Bomag) | BARATA | Besi | 2008 | APBD | Bidang Bina Marga |
| 2 | Buldozer | Caterpillar | Baja | 2012 | APBD | Bidang Bina Marga/ UPT |
| 3 | Baby Wales | United Tractor | Baja | 2012 | APBD | Bidang Bina Marga |
| 4 | Excavator | Hitachi | Baja | 2012 | APBD | Bidang Bina Marga/ UPT |
| 5 | Excavator | Komatsu PC200-8 | Baja | 2014 | APBD | UPT |
| 6 | Vibrator Roller | Bomag Tandem Vibratory Roller BW131 ACW-3 | Besi | 2016 | APBD | Bidang Bina Marga |
| 7 | Vibrator Roller | Bomag Tandem Vibratory Roller BW131 ACW-3 | Besi | 2016 | APBD | Bidang Bina Marga |
| 8 | Wheel Loader | Komatsu Wheel Loader Model WA200-5 | Besi | 2016 | APBD | Bidang Bina Marga |
| 9 | Backhoe Loader | Komatsu Rigid Backhoe Loader WB93R-5 | Besi | 2016 | APBD | Bidang Bina Marga |
| 10 | Motor Grader | Komatsu Motor Grader Model GD511A-1 | Besi | 2016 | APBD | Bidang Bina Marga |

*Sumber : DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang, 2023*

Berdasarkan Tabel 2.5 diatas menunjukkan bahwa alat-alat berat terdiri atas vibrator roller 4 unit, bulldozer 1 unit, baby wales 1 unit, excavator 2 unit, wheel loader 1 unit, backhoe loader 1 unit, dan motor grader 1 unit. Seluruh alat-alat berat tersebut dalam kondisi baik dan siap pakai. Penanggungjawab alat-alat berat yaitu UPT Pengujian Bahan dan Pengelolaan Alat berat dan UPT Prasarana Dan Sarana Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Peralatan dan mesin selanjutnya adalah alat-alat laboratorium yang proses pengadaan dilakukan sejak tahun 2010 dan penanggungjawab adalah UPT Pengujian Bahan dan Pengelolaaan Alat berat. Daftar alat-alat laboratorium dapat dilihat pada Tabel 2.6 dibawah ini:

**Tabel 2.6**

**Asset Alat-Alat Laboratorium**

**DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama barang / Jenis barang** | **Volume** | **Satuan** | **Merk/ Type** | **Bahan** | **Tahun Pembelian** | **Sumber** |
|
|
| 1 | Pemadatan (Compaction Test) | 1 | Unit | SO - 350 | Besi | 2010 | APBD |
| 2 | Los Angeles Abrassion Machine | 1 | Unit | AG-700 | Baja | 2010 | APBD |
| 3 | Berat Jenis dan Penyerapan Aggregat | 1 | Unit | AG-830 | Besi | 2010 | APBD |
| 4 | Loss On Heating / Thing-Film Test | 1 | Unit | BI-220 A | Baja | 2010 | APBD |
| 5 | Kadar Aspal | 1 | Unit | MGB-18 | Besi | 2010 | APBD |
| 6 | Sand Equivalent Test Set | 1 | Unit | AG - 600 | Plastik | 2010 | APBD |
| 7 | Sand Equivalent Shaker | 1 | Unit | AG - 610 | Plastik | 2010 | APBD |
| 8 | Sand Equivalent | 1 | Unit | AG-700 | Plastik | 2010 | APBD |
| 9 | CBR Laboratorium (Electric) | 1 | Unit | SO - 360 | Besi | 2010 | APBD |
| 10 | Aspal Compactor Test | 1 | Unit | BI-325 AAC | Besi | 2010 | APBD |
| 11 | Bengklem Beam | 1 | Unit | BI-450 | Besi | 2010 | APBD |
| 12 | Mercury Bottled | 1 | Unit | BI-400 | Kaca | 2010 | APBD |
| 13 | Analisa Saringan (Electric) | 1 | Unit | SO - 515 | Besi | 2010 | APBD |
| 14 | Sieve # 100 | 1 | Unit | AG-238 A | Besi | 2010 | APBD |
| 15 | Liquit Limit Device (Electric) | 1 | Unit | SO - 311 B | Besi | 2010 | APBD |
| 16 | Triple Beam Balance 0,1 | 1 | Unit | GE - 152 | Besi | 2010 | APBD |
| 17 | Triple Beam Balance 0,01 | 1 | Unit | GE - 150 | Besi | 2010 | APBD |
| 18 | Laboratori Concrete Test Hammer | 1 | Unit | CO-610 | Besi | 2010 | APBD |
| 19 | Concrete Test Hammer | 1 | Unit | CO-55015 | Baja | 2010 | APBD |
| 20 | Hydrometer Test | 1 | Unit | SO - 330 A | Plastik | 2010 | APBD |
| 21 | Sand Cone Test | 1 | Unit | SO - 400 | Fiber | 2010 | APBD |
| 22 | Berat Jenis Tanah (Spesific Grafiti) | 1 | Unit | SO - 340 | Besi | 2010 | APBD |
| 23 | GPS | 2 | Unit | Oregon 550i | - | 2011 | APBD |
| 24 | Sieve 4" | 1 | Unit | ( AG - 300 A ) | - | 2011 | APBD |
| 25 | Sieve 3" | 1 | Unit | ( AG - 302 A ) | - | 2011 | APBD |
| 26 | Sieve 2 1/2" | 2 | Unit | ( AG - 303 A ) | - | 2011 | APBD |
| 27 | Sieve 1/2" | 2 | Unit | ( AG - 312 A ) | - | 2011 | APBD |
| 28 | Sieve 12" | 2 | Unit | ( AG - 324 A ) | - | 2011 | APBD |
| 29 | Sieve 200" | 2 | Unit | ( AG - 324 A ) | - | 2011 | APBD |
| 30 | Pan + Cover | 2 | Unit | (AG - 350 ) | - | 2011 | APBD |
| 31 | Flow Meter | 1 | Unit | - | - | 2011 | APBD |
| 32 | Concrete Cube Mold | 2 | Unit | - | - | 2011 | APBD |
| 33 | Waterpas | 1 | Unit | Top Con / AT-B4 | Besi | 2014 | APBD |
| 34 | GPS | 2 | Unit | Garmin / 78S | Plastik | 2014 | APBD |
| 35 | Kompas | 4 | Unit | Sunto / KB-14/360 R | Plastik | 2014 | APBD |
| 36 | Sand Cone Test Set | 1 | Unit | - | Baja | 2014 | APBD |
| 37 | Field CBR Test Set (CBR Lapangan) | 1 | Unit | - | Baja | 2014 | APBD |
| 40 | Consolidation Test Set | 1 | Unit | - | Baja | 2014 | APBD |
| 41 | Concrete Cube Mold | 10 | Unit | - | Baja | 2014 | APBD |
| 42 | Slump Test Set | 1 | Unit | - | Baja | 2014 | APBD |
| 43 | Heavy Duty Solution Balance | 1 | Unit | - | Besi | 2014 | APBD |
| 44 | Round Sieve 2" | 2 | Unit | NRT | Tembaga | 2014 | APBD |
| 45 | Round Sieve 1 1/2" | 2 | Unit | NRT | Tembaga | 2014 | APBD |
| 46 | Round Sieve 1" | 2 | Unit | NRT | Tembaga | 2014 | APBD |
| 47 | Round Sieve 3/4" | 2 | Unit | NRT | Tembaga | 2014 | APBD |
| 48 | Round Sieve 3/8" | 3 | Unit | NRT | Tembaga | 2014 | APBD |
| 49 | Round Sieve # 4 | 2 | Unit | NRT | Tembaga | 2014 | APBD |
| 50 | Round Sieve # 8 | 2 | Unit | NRT | Tembaga | 2014 | APBD |
| 51 | Round Sieve # 10 | 2 | Unit | NRT | Tembaga | 2014 | APBD |
| 52 | Round Sieve # 16 | 2 | Unit | NRT | Tembaga | 2014 | APBD |
| 53 | Round Sieve # 30 | 2 | Unit | NRT | Tembaga | 2014 | APBD |
| 54 | Round Sieve # 40 | 3 | Unit | NRT | Tembaga | 2014 | APBD |
| 55 | Round Sieve # 50 | 2 | Unit | NRT | Tembaga | 2014 | APBD |
| 56 | Round Sieve # 100 | 2 | Unit | NRT | Tembaga | 2014 | APBD |
| 57 | Round Sieve # 200 | 2 | Unit | NRT | Tembaga | 2014 | APBD |
| 58 | Pan & Cover | 2 | Unit | NRT | Tembaga | 2014 | APBD |
| 59 | Dessicator | 1 | Unit | - | Kaca | 2014 | APBD |
| 60 | Manometer 0-60 kg/cm2 | 2 | Unit | Mueller | Kaca | 2014 | APBD |
| 61 | GPS | 5 | Unit | Garmin Oregon 650 | Fiber | 2015 | APBD |
| 62 | Meter Laser | 10 | Unit | Bosch GLM 150 | Plastik | 2016 | APBD |
| 63 | Meter Tongkat | 10 | Unit | Togoshiseiki | Plastik | 2016 | APBD |
| 64 | Digital Balance | 2 | Unit | - | Fiber | 2016 | APBD |
| 65 | Hydrolic Dutch Cone Penetrometer | 1 | Unit | - | Baja | 2016 | APBD |
| 66 | Soundness Test | 1 | Unit | - | Fiber | 2016 | APBD |
| 67 | Brass Round Sieve | 2 | Unit | - | Kuningan | 2016 | APBD |
| 68 | LaboratorynPenetration Test Set | 1 | Unit | - | Aluminium | 2016 | APBD |
| 69 | Marshall Tes Set | 1 | Unit | - | Baja | 2016 | APBD |
| 70 | Core Drilling Tes Set | 1 | Unit | - | Baja | 2016 | APBD |
| 71 | Saybolt Viscosimeter | 1 | Unit | - | Baja | 2016 | APBD |
| 72 | Reflux Extractor Tes Set | 1 | Unit | - | Kaca | 2016 | APBD |
| 73 | Specipic Gravity | 1 | Unit | - | Kaca | 2016 | APBD |
| 74 | Compression Machine | 1 | Unit | - | Baja | 2016 | APBD |
| 75 | Hydraulic Concrete Beam Testing Machine | 1 | Unit | - | Baja | 2016 | APBD |
| 76 | Concrete Beam Mold | 3 | Unit | - | Baja | 2016 | APBD |
| 77 | Concrete Cylinder Mold | 9 | Unit | - | Baja | 2016 | APBD |
| 78 | Vibrating Table | 1 | Unit | ***-*** | Baja | 2016 | APBD |
| 79 | Core Drill Beton | 1 | Unit | ***-*** | Baja | 2016 | APBD |
| 80 | Vertical Cylinder Capping | 1 | Unit | ***-*** | Baja | 2016 | APBD |
| 81 | Mesin Cutter Aspal | 2 | Unit | Firman / SFE200ECS | - | 2017 | APBD |
| 82 | Mesin Mixer AMP Mini | 1 | Unit | Shuangchai | Besi | 2018 | APBD |
| 83 | Pengujian Tanah | 1 | Unit | - | Besi | 2018 | APBD |
| 84 | Pengujian Beton | 1 | Unit | - | Besi | 2018 | APBD |
| 85 | Pengujian Aspal | 1 | Unit | - | Besi | 2018 | APBD |

*Sumber : DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang, 2023*

**2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pencapaian kinerja DISBIMACIPTA tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) pada Renstra Dinas Bimacipta Kabupaten Pinrang Tahun 2019 - 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024, Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, indikator lain pada TPB/SDGs berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1. **ISU STRATEGIS**

Pembangunan infrastruktur di Indonesia menghadapi tantangan berat untuk terus berbenah menuju infrastruktur yang handal di level global dan internasional. Berdasarkan Indeks Daya Saing Global, Indonesia menempati peringkat 37 dari 140 negara pada Tahun 2021. Kondisi tersebut terus membaik dibarengi dengan perbaikan struktur perekonomian nasional. Selain itu, sejalan dengan komitmen kemudahan berusaha, peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia menempati peringkat 73 pada Tahun 2021 serta Indonesia dikategorikan sebagai negara layak investasi oleh 3 lembaga pemeringkat internasional terkemuka.

Sesuai dengan visi misi Bupati terpilih, isu isu strategis dan prioritas yang menjadi tugas Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang adalah :

1. Rendahnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah berbasis elektronik;
2. Rendahnya mutu pelayanan publik di Dinas;
3. Kurangnya pembangunan infrastuktur jalan pada wilayah Pinrang Utara;
4. Belum tuntasnya pembangunan infrastruktur jalan kabupaten;
5. SPAM jaringan berpipaan melalui unit produksi air minum terdiri atas SPAM Zona I, SPAM Zona II, dan SPAM Zona III yang belum optimal pengelolaannya; dan
6. Belum adanya rencana rinci terhadap pengembangan Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Kawasan perkotaan Pinrang yaitu sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, dan sebagian wilayah Kecamatan Tiroang.

Berdasarkan langkah – langkah penyusunan sasaran dan arah kebijakan jangka menengah pelayanan DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024, maka ditetapkan perumusan sasaran dan arah kebijakan sebagaimana dalam Tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 2.7** **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Visi :**  Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah | | | |
| **Misi 1 :**  Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| **Tujuan 1 :**  Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik | **Sasaran 1.1 :**  Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik dan dukungan kinerja pelayanan publik | **Strategi 1.1.1 :**  Meningkatkan kompetensi SDM aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkini dalam mendukung kinerja pelayanan publik | **Kebijakan 2021:**  Penerapan standarisasi pengukuran kinerja dan pelaporan |
| **Misi 5 :**  Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| **Tujuan 2 :**  Menurunkan kesenjangan antar wilayah dalam penyediaan infrastruktur jalan, air minum, dan sarana/prasarana publik lainnya sesuai pemanfaatan ruang wilayah | **Sasaran 2.1 :**  Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan pada Wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang, dan sarana/prasarana publik lainnya | **Strategi 2.1.1 :**  Meningkatkan jangkauan infrastruktur jalan kabupaten serta jalan dan bangunan pelengkap pada wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang | **Kebijakan 2021:**  Optimalisasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan kabupaten serta jalan dan bangunan pelengkap pada wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang |
| **Sasaran 2.2:**  Meningkatnya pelaksanaan fungsi penataan ruang wilayah sesuai peruntukannya | **Stategi 2.2.1:**  Meningkatkan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya | **Kebijakan 2021 :**  Optimalisasi pembinaan pemanfaatan ruang wilayah |

1. **ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan, maupun pengalokasian sumber daya yang memerlukan pemahaman tentang apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan mengapa ia melakukan itu. Dengan demikian strategis merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan tanggapan yang mendasar (outline respon) organisasi terhadap tantangan tantangan mendasar yang dihadapi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja perangkat daerah seperti Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang harus selalu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur itu seharusnya diorganisir sehingga dapat menghasilkan tatanan organisasi yang benar benar mampu mengemban visi dan misi pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan berbagai pilihan alternative yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur tentu akan didasarkan pada pemilihan isu-isu strategis dalam menentukan prioritas kegiatan dan ini menjadi mandate dan tantangan mendasar yang dihadapi Disbimacipta dalam peningkatan kinerjanya.

Isu – isu strategis yang dihadapi oleh Disbimacipta dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan eksternal dan internal. Selain itu dapat pula disebabkan karena adanya perubahan mandate dan bidang urusan Disbimacipta.

Melalui uraian di atas, dapat dirumuskan pengertian dalam konseptual tentang peningkatan kinerja organisasi Disbimacipta yaitu sebagai usaha untuk meningkatkan hasil-hasil kerja pegawai Disbimacipta dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja Disbimacipta itu secara teoritis menyentuh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja umum suatu organisasi yaitu dari factor internal : pertama, aspek input/sumber daya berupa SDM, ekonomi (anggaran/keuangan), sarana prasarana/fasilitas, data dan informasi serta budaya organisasi; kedua, aspek proses manajemen melalui unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan evaluasi; dan ketiga aspek output/hasil yang meliputi produk dan pelayanan yang professional, akuntabel dan berkelanjutan.

Setiap unsur ini memeiliki potensi yang sama untuk muncul sebagai factor dominan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi baik dari segi peningkatan maupun penurunan.

Selain factor internal tersebut, faktor eksternal juga secara langsung dapat mempengaruhi kinerja Disbimacipta, seperti perubahan –perubahan kondisi politik, ekonomi, social budaya, teknologi, kondisi alam dan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan penyediaan input, proses pelaksanaan dan pemanfaat output.

## BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

1. **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan pokok-pokok visi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan, dimana untuk mencapai suatu tujuan dapat melalui beberapa sasaran dan memperhatikan relevansinya dengan isu-isu strategis daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 telah sesuai dengan tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 dengan menjabarkan secara operasional visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang masa jabatan tahun 2019-2024. Tujuan dan sasaran jangka menengah DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang telah memperhatikan isu-isu strategis daerah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah seperti yang tesedia pada Tabel 2.1.

**Tabel. 2.1**

**Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**

**Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **Target Kinerja Pada Tahun** | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik |  | Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik dan dukungan kinerja pelayanan publik | Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah | 78 (BB) | 79 (BB) | 82 (A) | 84 (A) |
| Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah | 89,5 (Sangat Baik) | 90 (Sangat Baik) | 90,5 (Sangat Baik) | 91 (Sangat Baik) |
| 2 | Menurunkan kesenjangan antar wilayah dalam penyediaan infrastruktur jalan, air minum, dan sarana/prasarana publik lainnya sesuai pemanfaatan ruang wilayah |  | Indeks layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum | 0,811 | 0,866 | 0,944 | 0,953 |
| Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan pada Wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang, dan sarana/prasarana publik lainnya | Kualifikasi panjang jalan kabupaten yang baik dan sedang | 71,73% | 82,77% | 98,26% | 100% |
| Tingkat kemantapan jalan Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang | 61,31% | 69,74% | 78,16% | 100% |
| Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya pelaksanaan fungsi penataan ruang wilayah sesuai peruntukannya | Ketaatan terhadap RTRW | 100% | 100% | 100% | 100% |

*Sumber : Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kab. Pinrang Tahun 2019 – 2024*

1. **STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disingkat dengan DISBIMACIPTA menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024 yang selanjutnya disingkat Renstra DISBIMACIPTA Tahun 2019 - 2024 mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan Kabupaten Pinrang di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selama 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Proses penyusunan Renstra DISBIMACIPTA Tahun 2019-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yaitu tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra DISBIMACIPTA Tahun 2019-2024 tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 dan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024 dan bersifat indikatif. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra untuk periode 5 (lima) tahun. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Pinrang terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

* + 1. **Telaahan Visi dan Misi**

Bupati dan Wakil Bupati Pinrang terpilih masa jabatan tahun 2019 – 2024 adalah H. A. Irwan Hamid, S.Sos dan Drs. H. Alimin, M.Si dengan visi : *“****Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah****” .* Rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Pinrang masa jabatan tahun 2019-2024 mengandung 5 (lima) substansi pokok yaitu masyarakat sejahtera, (2) religius, (3) harmonis, (4) mandiri, dan (5) tangguh mengelola potensi daerah. Adapun kandungan dari 5 (lima) pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

* 1. “**Sejahtera**” adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pinrang yang terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan cukup. Ini ditandai dengan jumlah penduduk miskin yang rendah, pendapatan masyarakat yang tinggi, derajat pendidikan yang tinggi, derajat kesehatan yang tinggi, akses pelayanan publik yang mudah.
  2. “**Religius**” adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pinrang yang didalamnya atmosfir kehidupan kerohanian berkembang. Ini ditandai dengan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa serta memanifestasikan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.
  3. “**Harmonis**” adalah kondisi masyarakat yang hidup tenteram. Ini ditandai dengan terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup masyarakat berlandaskan kebersamaan dan toleransi serta mencintai kearifan budaya dan lingkungan alam kehidupannya.
  4. “**Mandiri**” adalah kondisi masyarakat yang memiliki prakarsa dalam mewujudkan keberdayaan. Ini ditandai dengan kuatnya keswadayaan, semangat gotong royong dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi dan ekologi.
  5. “**Tangguh Mengelola Potensi Daerah**” adalah gambaran tentang kuatnya kesungguhan pemerintah daerah bersama masyarakat mengelola potensi unggulan daerah pada sektor pertanian dalam arti luas sektor potensil lainnya agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Dengan pokok-pokok visi tersebut, tujuan luhur atau *ultimate goals* yang ingin diwujudkan lima tahun kedepan adalah “Pinrang sebagai lumbung pangan nasional”. Ukuran dari posisi “Pinrang sebagai lumbung pangan nasional” adalah tercapainya surplus produksi pangan pokok (*staple food*) yakni beras yang dikontribusikan untuk pemenuhan kebutuhan beras daerah lain di Indonesia.

Misi dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk mewujudkan pokok visi yang relevan. Rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati Pinrang masa jabatan tahun 2019-2024 terdiri atas 7 (tujuh) misi dan terdapat 2 (dua) misi yang sesuai tugas dan fungsi pelayanan DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

* 1. **Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.**

Misi ini mencakup upaya pokok mewujudkan sistem birokrasiyang akuntabel dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Upaya perwujudan sistem birokrasi yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sehingga berjalan tata kelola berbasis elektornik atau *electronic governance* (*e-governance*).

* 1. **Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.**

Misi ini mencakup upaya pokok dalam optimalisasi pengelolaan infrastruktur dan sarana/prasarana publik terutama untuk mengatasi ketertinggalan di wilayah pegunungan Pinrang Utara dan wilayah terpencil.Pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana publik tersebut juga diarahkan untuk mendukung kinerja sektor unggulan pembangunan yakni pertanian/agribisnis serta memperlancar koneksivitas wilayah.

1. **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang telah menetapkan indicator kinerja utama untuk tahun 2019 – 2024.

Penetapan indikator kinerja perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang serta pencapain visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang masa jabatan tahun 2019-2024. Penetapan indikator kinerja tersebut meliputi indikator kinerja sesuai tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024, indikator kinerja SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, indikator kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator kinerja kunci (IKK) sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, dan indikator TPB/SDGs sesuai Perpres Nomor 59 Tahun 2017. Indikator kinerja sasaran sesuai sasaran perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang.

Penetapan IKU DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang tahun 2021-2024 merupakan perubahan atas IKU pada Renstra DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 yang telah disesuaikan atas perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Penetapan IKU yaitu indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2. 2**

**Indikator Kinerja Utama**

**Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Tahun 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Indikator** | **Satuan** | **Alasan** | **Sumber Data** | **Target** |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik dan dukungan kinerja pelayanan publik | Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah | - | Mendukung RPJMD | SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. (Hal. 74, RPJMD, 2.2.2 Kesejahteraan Sosial, nomor 24) | 82(A) |
| 2 | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah |  | Mendukung RPJMD | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadapap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik (Hal. 75, RPJMD, 2.2.2 Kesejahteraan Sosial, nomor 25) | 90,5 (Sangat Baik) |
| 3 | Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten jalan pada Wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang, dan sarana/prasarana publik lainnya | Tingkat kemantapan jalan Kabupaten | % | Mendukung RPJMD | Persentasi panjang jalan kondisi mantap dibagi panjang jalan kabupaten (RPJMD, Hal. 91, Poin 7) | 98,26% |
| 4 | Tingkat kemantapan jalan Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang | % | Mendukung RPJMD | Persentasi panjang jalan kondisi mantap di wilayah Kab. Pinrang bagian utara yang terdiri atas Kec. Lembang, Kec. Duampanua, dan Kec. Batulappa, dibagi panjang jalan keseluruhan kabupaten diwilayah Kab.Pinrang bagian utara (RPJMD, Hal. IV – 8) | 78,16% |
| 5 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi | % | Mendukung RPJMD | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum dibagi jumlah rumah tangga keseluruhan di Kab. Pinrang (RPJMD, Hal. 86) | 100% |
| 6 | Meningkatnya pelaksanaan fungsi penataan ruang wilayah sesuai peruntukannya | Ketaatan terhadap RTRW | % | Mendukung RPJMD | Luas kawasan yang beralih fungsi dibagi luas kabupaten keseluruhan ( RPJMD, Hal. 55) | 100% |

*Sumber : Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kab. Pinrang Tahun 2019 - 2024*

1. **Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2019 - 2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja Dinas**

**Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Tahun 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **sasaran** | **Indikator** | **Satuan** | **Target** |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik dan dukungan kinerja pelayanan publik | Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah | - | 82 (A) |
| Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah |  | 90,5 (Sangat Baik) |
| 2 | Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten jalan pada Wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang, dan sarana/prasarana publik lainnya | Tingkat kemantapan jalan Kabupaten | % | 98,26% |
| Tingkat kemantapan jalan Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang | % | 78,16% |
| Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi | % | 100% |
| 3 | Meningkatnya pelaksanaan fungsi penataan ruang wilayah sesuai peruntukannya | Ketaatan terhadap RTRW | % | 100% |

*Sumber : Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kab. Pinrang Tahun 2019 - 2024*

1. **STANDAR PENILAIAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelakanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.6 Standar Penilaian Kinerja

|  |  |
| --- | --- |
| Nilai | Pencapaian |
| 110 ke atas | Sangat tercapai/Sangat berhasil |
| 90 ≤ - < 110 | Tercapai / Berhasil |
| 60 ≤ - < 90 | Cukup tercapai/Cukup berhasil |
| X < 60 | Tidak tercapai/Tidak berhasil |

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi / Target x 100%

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi / Terget x 100%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.

SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). DPA menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja. Indikator Kinerja memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) spesifik (*specific*); (2) dapat terukur (*measurable*); (3) dapat dicapai (*attainable*); (4) berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan (5) dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Setiap SKPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama SKPD. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat SKPD disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan SKPD. Setiap SKPD melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara: (1) membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan; dan (2) membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD.

Setiap SKPD melakukan pengelolaan data Kinerja. Pengelolaan data Kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja. Pengelolaan data Kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah. Pengelolaan data Kinerja mencakup: (1) penetapan data dasar (*baseline data*); (2) penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi; (3) penatausahaan dan penyimpanan data; dan (4) pengkompilasian dan perangkuman.

Setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan. Laporan Kinerja interim adalah Laporan Kinerja triwulanan. Laporan Kinerja triwulanan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan. Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD, Kepala Daerah menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja tahunan berisi ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program paling sedikit menyajikan informasi tentang: (1) pencapaian tujuan dan Sasaran SKPD; (2) realisasi pencapaian target Kinerja SKPD; (3) penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan (4) pembandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD. SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan tugas pembantuan menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan tugas pembantuan disampaikan kepada Kepala Daerah dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Kepala Daerah menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan tugas pembantuan dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga mengkompilasi dan merangkum Laporan Kinerja Kegiatan tugas pembantuan di lingkungannya dalam Laporan Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Kategori Nilai Capaian untuk Presentase Pencapaian Sasaran**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Urutan | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Penilaian Realisasi Kinerja |
| I | >90,01% | Sangat Tinggi |
| II | 75,01% - 90,00% | Tinggi |
| III | 65,01% - 75,00% | Sedang |
| IV | 50,01% - 65,00% | Rendah |
| V | < 50,00% | Sangat Rendah |

* 1. **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Berikut ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama**

**Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kab. Pinrang Tahun 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Utama** | **Target 2023** | **Realisasi Sampai dengan Tahun 2022** | **Capaian** |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik dan dukungan kinerja pelayanan publik | Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah | 82 (A) | - | - |
| Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah | 90,5 (Sangat Baik) | 94,61 | 104,54% |
| 2 | Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan pada Wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang, dan sarana/prasarana publik lainnya | Kualifikasi panjang jalan kabupaten yang baik dan sedang | 98,26% | 67,72% | 68,91% |
| Tingkat kemantapan jalan Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang | 78,16% | 61% | 78,04% |
| Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi | 100% | 96,33% | 96,33% |
| 3 | Meningkatnya pelaksanaan fungsi penataan ruang wilayah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup daerah | Ketaatan terhadap RTRW | 100% | 100% | 100% |

Dari tabel 3.1 terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian kinerja yang menurun dari target 98,26% ditunjukan pada indikator Proporsi panjang jalan kondisi mantap, dengan capaian kinerja 67,72 %. Untuk indikator Tingkat kemantapan jalan Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang dengan target 78,16%, hingga tahun 2023, telah mencapai 61%. Pada indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi, dengan capaian kinerja 96,33% juga belum memenuhi target, dengan target indicator sebesar 100%, Untuk indicator ketaatan terhadap RTRW, dengan target 100%, dengan capaian mencapai 100%.

**Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2023**

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang secara umum telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019 - 2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 sebanyak 4 sasaran.

Tahun 2023 adalah tahun ke - 4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

* + 1. **Sasaran Strategis** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik dan dukungan kinerja pelayanan publik

**Tabel 3.2 Sasaran Strategis kesatu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | | **Realisasi** | | **Capaian** | | | **Kategori Nilai Capaian** |
| **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | | **2022** | **2023** |
| 1 | Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah | 79 (BB) | 82 (A) | 81,90 | - | | 103,67% | Belum ada hasil Reviu APIP | - |
| 2 | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah | 90(Sangat Baik) | 90,5 (Sangat Baik) | 86,76 | 94,61 | | 95,34% | 104,54% | Sangat Baik |

Berdasarkan data yang tersebut diatas, indikator Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah pada tahun 2022 dengan target 79 dengan predikat BB. Dari capaian target tersebut, telah terealisasi capaian nilai 81,90 (A) dan telah melampaui target. Untuk tahun 2023, hingga LKjIP Tahun 2023 disusun, data tentang nilai SAKIP tahun 2023 belum ada.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah pada tahun 2022 memiliki target 90 dengan predikat sangat baik dengan realisasi 86,76 dan memiliki capaian sebesar 95,34%, selanjutnya untuk tahun 2023 semester II mencapai realisasi 94,61 dengan capaian 104,54%

* + 1. **Sasaran Strategis :** Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan pada Wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang, dan sarana/prasarana publik lainnya

**Tabel 3.5 Sasaran Strategis Kedua**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | | **Realisasi** | | **Capaian** | | **Kategori Nilai Capaian** |
| **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2022** |  |
| 1 | Kualifikasi panjang jalan kabupaten yang baik dan sedang | 82,77% | 98,26% | 69,52% | 67,72% | 83,99% | 68,91% | Sedang |
| 2 | Tingkat kemantapan jalan Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang | 69,74% | 78,16% | 63,20% | 61% | 90,62% | 78,04% | Tinggi |
| 3 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi | 100% | 100% | 95,97% | 96,33% | 95,97% | 96,33% | Sangat Tinggi |

Berdasarkan data tampilan kinerja tersebut, indikator kinerja “**Kualifikasi panjang jalan kabupaten yang baik dan sedang**” pada tahun 2023 masuk dalam kategori “**Sedang**” dengan target 98,26% dan realisasi 67,72%. Angka capaian tersebut diperoleh dengan formulasi persentasi kualifikasi panjang jalan kabupaten yang baik dan sedang dibagi total panjang jalan kabupaten.

Pelaksanaan program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten yang berarti peningkatan/pembangunan kualitas jalan kabupaten sehingga layak untuk mobilitasi barang dan jasa. Beberapa kegiatan peningkatan jalan tahun anggaran 2023 antara lain Peningkatan jalan ruas Letta - Kariango Kec. Lembang dengan panjang 5,642 km, ruas jalan Malimpung – Padangloang dengan panjang 0,571 km, ruas jalan Tiroang – Sulili sepanjang 0,935 km, ruas A. Johan Kec. Paleteang 0,320 km, poros Cempa I - Sikkulae 0,686 km, ruas jalan Kariango – Dolangang (Bottae) 0,387 km dan peningkatan jalan ruas Pincara – Teppo dengan panjang 0,583 km, ruas jalan Rajang – Padang sepanjang 0,927 km, ruas jalan Pinrang – jampue 0,400 km dan Ruas Jalan kesehatan ( Jalan Menuju SMK 2) 0,250 km. selanjutnya jalan yang direkontruksi atau direhabilitasi tahun 2023 antara lain ruas Garessi – Ujung Lero sepanjang 2,047 km, ruas Polewali - Tammappa sepanjang 2,05 km.

Pelaksanaan Program rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan se Kabupaten Pinrang yang optimal turut mendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik. Meskipun pada kegiatan pemeliharaan jalan ini hanya untuk permukaan jalan saja dan tidak mempunyai nilai konstruksi, tetapi dapat menutup lubang – lubang jalan yang ada, sehingga menjadi lebih layak dilalui. Pelaksanaan program penyelenggaraan jalan, khususnya kegiatan penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota. Adanya peningkatan pembangunan jalan kabupaten dan pengelolaan secara swakelola kegiatan pemeliharaan jalan baik secara berkala maupun rutin. Selain itu juga, ada beberapa kegiatan terkait yang tujuan akhirnya adalah untuk pengelolaan jalan dan bangunan prasarana pelengkapnya.

Untuk indikator tingkat kemantapan jalan Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang, nilai capaiannya di tahun 2022 adalah 63,20%, dengan target 69,74% sedangkan capaian di tahun 2023 sebesar 61% dari target 78,16%. Dari realisasi tersebut, nilai capaian hingga tahun 2022 adalah sebesar 90,62% dan pada tahun 2023 hanya sebesar 78,04%. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kondisi cuaca, dan mengakibatkan salah satunya longsor dibeberapa titik ruas di daerah pengunungan.

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah indikator yang juga pada tahun 2022 mendapatkan predikat kinerja “**sangat tinggi**”, dengan capaian kinerja 95,97%. Sedangkan untuk tahun 2023 dengan capaian kinerja 96,33%.

Adapun hal-hal utama yang menjadi pemicu keberhasilan tersebut adalah pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, dan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).

* + 1. **Sasaran Strategis** : Meningkatnya pelaksanaan fungsi penataan ruang wilayah sesuai peruntukannya

**Tabel 3.6 Sasaran Strategis Indikator ketiga**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | | **Realisasi** | | **Capaian** | | **Kategori Nilai Capaian** |
| **2022** | **2023** | **2022** | **2023** | **2022** | **2023** |
| 1 | Ketaatan terhadap RTRW | 100% | 100% | 99,92% | 100% | 99,92% | 100% | Sangat Tinggi |

Berdasarkan data tampilan kinerja tersebut, indikator kinerja “**Ketaatan terhadap RTRW**” pada tahun 2022 dan tahun 2023 masuk dalam kategori “**sangat tinggi**” dengan target 100% dan realisasi 100%. Angka capaian tersebut diperoleh dengan formulasi persentasi luas kawasan yang tidak beralih fungsi dibagi luas kabupaten Pinrang.

Hal – hal yang mendasari capaian indikator pada bidang tata ruang, yaitu indikator “ketaatan terhadap RTRW”, antara lain terlaksananya pelaksanaan program Penyelenggaraan penataan ruang, pada kegiatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang.

**Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Rata Ruang Tahun 2019 – 2024 seperti dalam table di bawah ini :

**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2019 - 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Jangka Menengah** | **Realisasi Kinerja** | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik dan dukungan kinerja pelayanan publik | Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah | 82(A) | 72,2 (BB) | 72,03 | 79,05 | 81,90 | - |
| Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah | 90,5 (Sangat Baik) | 88,25 (Sangat Baik) | 80% | 86,50 | 86,76 | 94,61 (Sangat Tinggi) |
| 2 | Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan pada Wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang, dan sarana/prasarana publik lainnya | Kualifikasi panjang jalan kabupaten yang baik dan sedang | 98,26% | 95,58% | 65,72% | 61,35% | 69,52% | 67,72% |
| Tingkat kemantapan jalan Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang | 78,16% | 47,46% | 55,54% | 53,22% | 63,20% | 61% |
| Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi | 100% | 77% | --% | 95,05% | 95,97% | 96,33% |
| 3 | Meningkatnya pelaksanaan fungsi penataan ruang wilayah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup daerah | Ketaatan terhadap RTRW | 100% | 100% | 99,92% | 99,92% | 99,92% | 100% |

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, dari 6 Indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah 3 indikator kinerja yaitu Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah dan Ketaatan terhadap RTRW sedangkan 3 indikator belum mencapai target jangka menengah pada Renstra. Untuk indikator kinerja sasaran yang telah memenuhi target kinerja jangka menengah pada Renstra, berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya ( tahun 2019 dan 2020) maka dilakukan penyesuaian target kinerja pada perubahan Renstra tahun 2019 – 2024 yang dilakukan awal pertengahan tahun 2021.

**Realisasi Kinerja Dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional Lainnya.**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dengan target dan realisasi standar Pelayanan Minimal/ standar nasional sebagaiman table berikut :

**Tabel 3.4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pelayanan** | **Indikator Kinerja Utama** | **Realisasi Kinerja 2023** | **Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional** | |
| **Target**  **2023** | **Realisasi 2023** |
| 1 | Penyediaan kebutuhan  pokok air minum  sehari-hari | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi | 96,33% | 100% | 96,33% |
| 2 | Penyediaan Pelayanan pengolaha n air  limbah domestik | Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik | 98,45 % | 100% | 98,45% |

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, dijelaskan bahwa pencapaian indikator SPM Dinas Bina Marga Cipta Karya dan tata Ruang tahun 2023 sebanyak 2 indikator kinerja meliputi persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota sebesar 96,33% dari target nasional 100% dan persentase penduduk yang memperoleh layanan pegolahan air limbah domestic sebesar 98,45 dari target nasional 100%.

**Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran/ Indikator Kinerja** | **% Capaian** | **Rata-rata Capaian** | **Predikat** | | | |
| **110 keatas** | **90 = < s/d < 110** | **60 = < s/d < 90** | **< 60** |
| **Sangat Baik** | **Berhasil** | **Cukup Berhasil** | **Tidak Berhasil** |
| **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik dan dukungan kinerja pelayanan publik** |  | **94,61%** |  |  |  |  |
| Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah |  |  |  |  | **-** |  |
| Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah |  |  |  | **v** |  |  |
| **Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan pada Wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang, dan sarana/prasarana publik lainnya** |  | **74,68%** |  |  |  |  |
| Kualifikasi panjang jalan kabupaten yang baik dan sedang |  |  |  |  | **v** |  |
| Tingkat kemantapan jalan Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang |  |  |  |  | **v** |  |
| Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi |  |  |  | **v** |  |  |
| **Meningkatnya pelaksanaan fungsi penataan ruang wilayah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup daerah** |  | **100%** |  |  |  |  |
| Ketaatan terhadap RTRW | **100%** |  |  | **v** |  |  |

Berdasarkan data pada tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2023 dalam kategori Cukup berhasil dan Berhasil.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indiaktor kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik dan dukungan kinerja pelayanan publik

Berdasarkan data yang tersebut diatas, indikator Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah pada tahun 2022 dengan target 79 dengan predikat BB. Dari capaian target tersebut, telah terealisasi capaian nilai 81,90 dan telah melampaui target. Untuk tahun 2023, hingga LKjIP Tahun 2023 disusun, capaian nilai SAKIP tahun 2023 belum bisa ditampilkan karena belun ada hasil review dari APIP.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah pada tahun 2022 memiliki target 90 dengan predikat sangat baik dengan realisasi 86,76 dan memiliki capaian sebesar 96,4%, selanjutnya untuk tahun 2023 mencapai realisasi 94,61 dengan capaian 104,54%

**Sasaran Strategis 2 :** Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan pada Wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang, dan sarana/prasarana publik lainnya

Berdasarkan data tampilan kinerja tersebut, indikator kinerja “**Kualifikasi panjang jalan kabupaten yang baik dan sedang**” pada tahun 2023 masuk dalam kategori “**cukup berhasil**” dengan target 98,26% dan realisasi 67,72%. Angka capaian tersebut diperoleh dengan formulasi persentasi kualifikasi panjang jalan kabupaten yang baik dan sedang dibagi total panjang jalan kabupaten.

Pelaksanaan program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten yang berarti peningkatan/pembangunan kualitas jalan kabupaten sehingga layak untuk mobilitasi barang dan jasa. Beberapa kegiatan peningkatan jalan tahun anggaran 2023 antara lain Peningkatan jalan ruas Letta – Kariango Kec. Lembang dengan panjang 5,642 km, ruas jalan Malimpung - Padangloang dengan panjang 0,571 km, ruas jalan Tiroang - Sulili 0,935 km, ruas A. Johan Kec. Paleteang 0,320 km, Ruas Cempa I – Sikkuale 0,686 km, ruas jalan Kariango – Dolangang (Bottae)\_\_ 0,387 km dan peningkatan jalan ruas Pincara – Teppo dengan panjang 0,583 km, ruas Rajang Padang sepanjang 0,927 Km, ruas Pinrang – jampue sepanjang 0,400 km, peniongkatan jalan Kesehatan (menuju SMK 2) sepanjang 0,250 km. selanjutnya jalan yang direkontruksi atau direhabilitasi tahun 2023 antara lain ruas Garessi – Ujung Lero sepanjang 2,047 km, ruas Polewali - Tammappa sepanjang 2,05 km. Pelaksanaan Program rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan se Kabupaten Pinrang yang optimal turut mendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik. Meskipun pada kegiatan pemeliharaan jalan ini hanya untuk permukaan jalan saja dan tidak mempunyai nilai konstruksi, tetapi dapat menutup lubang – lubang jalan yang ada, sehingga menjadi lebih layak dilalui. Pelaksanaan program penyelenggaraan jalan, khususnya kegiatan penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota. Adanya peningkatan pembangunan jalan kabupaten dan pengelolaan secara swakelola kegiatan pemeliharaan jalan baik secara berkala maupun rutin. Selain itu juga, ada beberapa kegiatan terkait yang tujuan akhirnya adalah untuk pengelolaan jalan dan bangunan prasarana pelengkapnya.

Untuk indikator tingkat kemantapan jalan Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang, nilai capaiannya di tahun 2022 adalah 63,20%, dengan target 69,74% sedangkan capaian di tahun 2023 sebesar 61% dari target 78,16%. Dari realisasi tersebut, nilai capaian hingga tahun 2022 adalah sebesar 90,62% dan pada tahun 2023 sebesar 78,04%. Hal ini disebabkan oleh adanya pergantian musin yang mengakibatkan adanya beberapa titik ruas yang mengalami longsor.

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah indikator yang juga pada tahun 2022 mendapatkan predikat kinerja, dengan capaian kinerja 95,97%. Sedangkan untuk tahun 2023 dengan capaian kinerja 96,33%.

Adapun hal-hal utama yang menjadi pemicu keberhasilan tersebut adalah pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM), dan kegiatan pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM).

**Sasaran Strategis** **3** : Meningkatnya pelaksanaan fungsi penataan ruang wilayah sesuai peruntukannya

Berdasarkan data tampilan kinerja tersebut, indikator kinerja “**Ketaatan terhadap RTRW**” pada tahun 2022 dan tahun 2023 masuk dalam kategori “**berhasil**” dengan target 100% dan realisasi 100%. Angka capaian tersebut diperoleh dengan formulasi persentasi luas kawasan yang tidak beralih fungsi dibagi luas kabupaten Pinrang.

Hal – hal yang mendasari capaian indicator pada bidang tata ruang, yaitu indicator “ketaatan terhadap RTRW”, antara lain terlaksananya pelaksanaan program Penyelenggaraan penataan ruang, pada kegiatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang.

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Disbimacipta dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Disbimacipta adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Efesiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisiensi. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Disbimacipta dlam pelaksaaan program kegiatan :

**Tabel 3. 6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **% Kinerja** | | | **% Anggaran** | | | **%** |
| **Target** | **Realisasi** | **Capaian** | **Pagu** | **Realisasi** | **Capaian** |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik dan dukungan kinerja pelayanan publik | Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah | 82 (AA) | - | - | 10.256.624.017 | 9.896.070.652 | 96,48% | 84,05% |
|  |  | Nilai Survei kepuasan masyarakat (SKM) perangkat daerah | 90,5 (Sangat baik) | 94,61(Sangat Baik | 104,54% |
| 2 | Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan pada Wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang, dan sarana/prasarana publik lainnya | Kualifikasi jalan kabupaten yang baik dan sedang | 98,26% | 67,72% | 68,91% | 68.717.220.998 | 67.223.966.126 | 99,19% | 80,81% |
|  | Tingkat Kemantapan Jalan Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang | 78,16% | 61% | 78,04% |
|  | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi | 100% | 96,33% | 96,33% | 745.264.301 | 737.703.900 | 98,99% 0,88% | |
| 3 | Meningkatnya pelaksanaan fungsi penataan ruang wilayah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup daerah | Ketaatan terhadap RTRW | 100% | 100% | 100% | 680.761.412 | 668.659.500 | 99,39% | 0,80% |

Analisis atas Evisiensi penggunaan sumber daya ditinjau dari dua aspek yaitu personil dan anggaran. Pada tahun 2023, jumlah personil pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang sebanyak 70 orang terdiri dari 31 perempuan dan 39 laki – laki. Dari sisi tingkat pendidikan, proporsi ASN sudah cukup memadai, dengan tingkat pendidikan setara SLTA, Strata 1, Strata 2, dan strata 3 sudah memadai. Untuk selanjutnya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kinerja dinas, diantaranya dengan mengirim ASN untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga target kinerja dinas dapat tercapai.

Dari segi anggaran, pada tahun 2023 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang mengelola pagu sebesar Rp.85.126.812.007,-. Selain itu, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang juga mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

retribusi penyedotan kakus Rp. 35.000.000,-,

retribusi pemakaian laboratorium Rp. 35.000.000,-,

retribusi pemakaian sewa alat berat Rp. 80.000.000,- ; dan

retribusi izin mendirikan bangunan Rp. 700.000.000,-.

Dari anggaran yang ada, dioptimalkan untuk pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan. Strategi pengoptimalan anggaran ini antara lain dengan pemanfaatan kembali sisa pagu anggaran ke dalam kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**

Analis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Disamping itu juga analis bermakna /memiliki makna dan manpu menjawab pertanyaan yang telah diduga sebelumnya. Analisis terhadap program dan kegiatan yang dilaksankan Disbimacipta sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (perjanjian Kinerja)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Capaian**  **(%)** | **Program** | **Indikator Kinerja** | **Target**  **(%)** | **Realisasi**  **(%)** | **Capaian**  **(%)** | **Rencana Tindak Lanjut** |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik dan dukungan kinerja pelayanan publik | Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah | - | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi | 100% | 96,48% | 96,48% | Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui perumusan hubungan kerja / sistem tata kerja pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah |
|  | Nilai Survei kepuasan masyarakat (SKM) perangkat daerah | 94,61(A) |
| Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan pada Wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang, dan sarana/prasarana publik lainnya | Kualifikasi jalan kabupaten yang baik dan sedang | 67,72% | Penyelenggaraan Jalan | Kualifikasi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang | 98,26% | 67,72% | 68,91% | Penyediaan rencana kerja berbasis hasil inventarisasi data jalan secara teknis dan keilmuan, menghasilkan pelaksanaan pembangunan /peningkatan/pemeliharaan sesuai dengan dokumen teknis yang telah di rencanakan |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 99,42% | 98,45% | 99,02% | Mengoptimalkan pengelolaan SPALD meliputi perencanaan, pembangunan, sarana dan prasarana pengangkutan, IPLT, pengoperasian, pemeliharaan rutin /berkala, dan rehabilitasi serta peran swasta |
|  | Tingkat Kemantapan Jalan Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang | 61% | Pengelolaan dan pengembangan system drainase | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | 3,3% | 3,30% | 100% | Penyusunan dokumen data dasar terkait sistem drainase |
|  | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi | 96,33% | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase penduduk berakses air minum | 100% | 96,33% | 96,33% | Mengoptimalkan pengelolaan SPAM jaringan perpipaan, meliputi pembangunan baru, peningkatan, perluasan dan pemeliharaan serta kompetensi pengelola |
| Penataan Bangunan Gedung | Rasio kepatuhan IMB | 100% | 99,99% | 99,99% | Mengoptimalkan kinerja tim teknis dan TABG serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang permohonan IMB |
| Penataan bangunan dan lingkungannya | Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah | 0,020 | 0,141 | 209 | Penyusunan rencana kerja terkait kebutuhan material kelengkapan PJU |
| Meningkatnya pelaksanaan fungsi penataan ruang wilayah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup daerah | Ketaatan terhadap RTRW | 100% | Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya | 100% | 100% | 100% | Perlunya kerjasama antar stakeholder terkait ketertiban dan ketentraman dengan pemberlakuan tenaga PPNS dan pengesahan peraturan Bupati tentang ketentraman dan ketertiban |

Berdasarkan tabel 3.7 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut :

**Sasaran 1 :** Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik dan dukungan kinerja pelayanan publik

**Indikator 1 :** Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah, dengan target 82 (AA) realisasi belum bisa ditampilkan karena belum ada hasil reviuw dari APIP. Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

* Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**Indikator 2 :** Nilai Survei kepuasan masyarakat (SKM) perangkat daerah, dengan target 90,5 dengan kategori **sangat** **berhasil** dengan nilai sebesar 94,61 atau tercapai 104,54%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

* Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**Sasaran 2 :** Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan pada Wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang, dan sarana/prasarana publik lainnya

**Indikator 1 :** Kualifikasi jalan kabupaten yang baik dan sedang dengan target 98,26% dengan realisasi 67,72% dengan capaian 68,91% masuk kategori **cukup berhasil** dicapai. Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

* Penyelenggaraan Jalan

**Indikator 2 :** Tingkat Kemantapan Jalan Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang dengan target 78,16% dengan realisasi 61% dengan capaian 78,04% masuk kategori **cukup berhasil**. Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

* Penyelenggaraan Jalan

**Indikator 3 :** Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan target 100% dengan realisasi 96,33% dengan capaian sebesar 96,33% masuk kategori telah **berhasil** dicapai. Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

* Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

**Sasaran 3 :** Meningkatnya pelaksanaan fungsi penataan ruang wilayah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup daerah

**Indikator 1 :** Ketaatan terhadap RTRW dengan target 100%, dengan realisasi 100% dengan capaian 100% masuk kategori telah **berhasil** dicapai, Indikator ini dapat terlaksana melalui program:

* Penyelenggaraan Penataan Ruang
  + - * 1. **UPAYA PERBAIKAN PADA PERENCANAAN BERIKUTNYA**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Disbimacipta pada tahun 2023 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu :

**Sasaran 1 :** Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik dan dukungan kinerja pelayanan public

1. Peningkatan konpetensi aparatur perencana dan keuangan
2. Penerapan standarisasi pengukuran kinerja dan pelaporan
3. Penguatan TIK dalam mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan.
4. Penerapan system pengendalian instansi pemerintah (SPIP) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan.
5. Peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**Sasaran 2 :** Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan pada Wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang, dan sarana/prasarana publik lainnya

1. Penyiapan system, konsilidasi, sumber daya, dan akurasi data pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan kabupaten serta jalan dan bangunan pelengkap pada wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang.
2. Optimalisasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan kabupaten serta jalan dan bangunan pelengkap pada wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lambang.
3. Optimalisasi lanjutan pembanguan dan peningkatan infrastruktur jalan kabupaten serta jalan dan bangunan pelengkap pada wilayah kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang.
4. Optimalisasi pemeliharaan infrastruktur jalan kabupaten serta jalan dan bangunan pelengkap pada wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang.
5. Peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan kabupaten serta jalan dan bangunan pelengkap pada wilayah Kecamatan Batu lappa, Duampanua dan Lembang.

**Sasaran 3 :** Meningkatnya pelaksanaan fungsi penataan ruang wilayah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup daerah.

1. Penyiapan kebijakan pengaturan pemanfaatan ruang wilayah
2. Optimalisasi pembinaan pemanfaatan ruang wilayah
3. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah
4. Optimalisasi pembinaan, pengaturan dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah
5. Peningkatan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengawasan pemanfaatan ruang wilayah.
   * + - 1. **REALISASI ANGGARAN**

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu bagian dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana anggaran yang dikelola oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang adalah sebesar Rp. 85.126.812.007,- yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kab. Pinrang. Dari total anggaran yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), telah terealisasi sebesar Rp. 83.186.012.303,- atau dengan serapan 97,72% dari total APBD.

Dari Tabel 3.10 dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi dan efektivitas yang telah dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang pada Tahun 2023. Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif / kurang efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi.

**Tabel 3.8 Realisasi Anggaran**

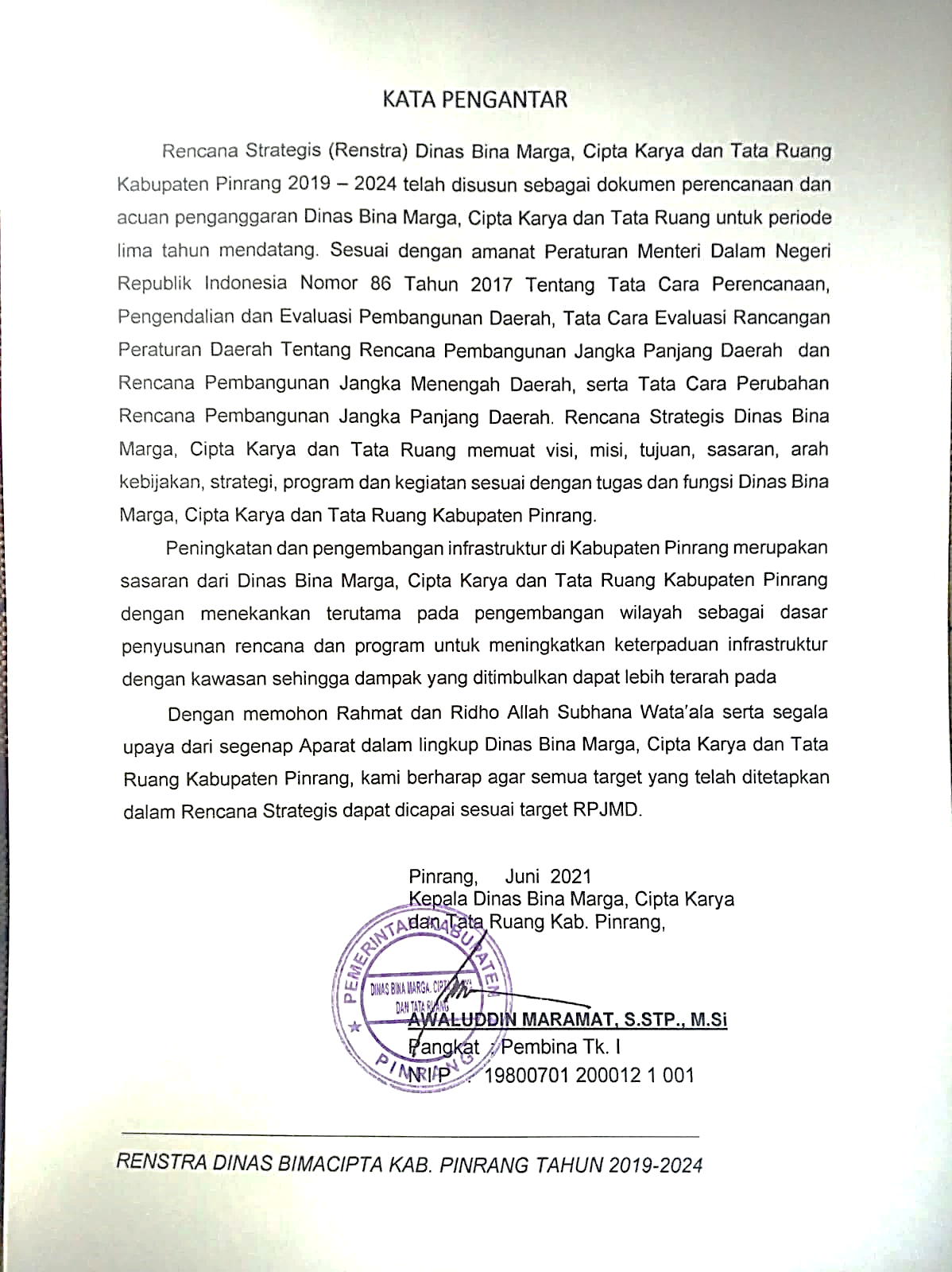
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Jumlah (Rp)** | |
| **Anggaran** | **Realisasi** |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik dan dukungan kinerja pelayanan publik | Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah | 10.256.624.017 | 9.896.070.652 |
| Nilai Survei kepuasan masyarakat (SKM) perangkat daerah |
| 2 | Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan pada Wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang, dan sarana/prasarana publik lainnya | Kualifikasi jalan kabupaten yang baik dan sedang | 68.717.220.998 | 67.223.966.126 |
| Tingkat Kemantapan Jalan Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang |
| Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi | 745.264.301 | 737.703.900 |
| 3 | Meningkatnya pelaksanaan fungsi penataan ruang wilayah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup daerah | Ketaatan terhadap RTRW | 680.761.412 | 668.659.500 |

* + - * 1. **BENCHMARKING DENGAN DAERAH LAIN**

Benchmark adalah proses membandingkan aspek tertentu dari sebuah

Organisasi dengan aspek yang sebanding milik organisasi yang dianggap lebih baik atau memiliki kemanpuan yang sama. Tujuan dari benchmark adalah untuk mendapatkan pandangan akurat tentang bagaimana operasi yang dilakukan sebuah organisasi dengan yang dilakukan organisasi lain dalam menghasilkan ide – ide untuk meningkatkan proses, pendekatan, teknologi dan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan. Dengan Benchmarking diharapkan sebuah organisasi melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus menerus, mengadopsi pola pikir untuk tumbuh dan melakukan inovasi.

Pada laporan Kinerja tahun 2023 ini, Disbimacipta Kab. Pinrang belum melakukan Benchmarking ke Laporan Kinerja Disbimacipta Kabupaten lain, untuk membandingkan realisasi dan capaian kinerja yang memiliki indikator yang sama pada tahun 2023,



**BAB IV**

**PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2023 ini menggambarkan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pada Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023. Secara umum capaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang

yang menunjukkan tingkat keberhasilan sasaran kinerja program Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pinrang dan dijabarkan dalam RENSTRA Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2023 ini dibuat agar menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang di masa yang akan datang.